

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI****UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BENNY PADILAH**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **738689**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.296.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.296.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 410.500.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 260.500.000
2. MOBIL, HONDA SATYA / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 5.185.703****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 1.711.685.703****III. HUTANG** **Rp. 111.200.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 1.600.485.703****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT NURUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1013854

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.005.000.000
1. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	
135.000.000		
2. Tanah Seluas 303 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	
120.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/100 m2 di KOTA JAMBI ,		
WARISAN Rp. 250.000.000		
4. Tanah Seluas 477 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	
500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	75.500.000
1. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
65.000.000		
2. MOTOR, BAJAJ PULSAR 180 Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.500.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	99.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	300.041.665
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.479.541.665



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.479.541.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURBAITI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 839663

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.650.000.000
1. Tanah Seluas 913 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	750.000.000
2. Tanah Seluas 1645 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
3. Tanah Seluas 272 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/70 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.000.000
1. MOBIL, SUZUKI 1000 CC/KATANA Tahun 2002, HASIL SENDIRI	Rp.	50.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	705.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.405.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.405.000.000

Catatan:



- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.